

ABSTRAK

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan hak otonomi dalam rangka bisa mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. adapun produk hukum desa diantaranya peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Pada pelaksanaannya, pemerintahan desa kerap kali tidak maksimal dalam menggunakan otonomi desa, sehingga banyak desa yang tidak bisa membentuk produk hukum desa sendiri sebab kurangnya pembinaan dan kordinasi dari pemerintahan daerah yang diwakili oleh dinas DPMD. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan urgensinya peraturan desa dalam memberikan kepastian hukum terhadap Pemasukan APBDES Dalam Pengelolaan Wisata Mangrove yang berada di desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode penelitian secara yuridis empiris, yaitu dengan melakukan observasi lapang, wawancara dan menganalisa dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi lapangan atau pendekatan sosiologis empiris berupa mengamati apa yang terjadi dilapangan, dan penerapan peraturan-peraturan dalam prakteknya di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pemerintah desa selaku pemimpin desa yang memiliki hak otonomi desa tidak maksimal dalam menggunakannya. Hal ini di buktikan bahwa Desa Kebundadap Timur yang memiliki potensi wisata dengan membangun wisata mangrove tidak memiliki peraturan desa yang mengatur tentang tata kelola wisata mangrove yang memuat pemasukan ke APBDES. Seharusnya pemerintah desa sebelum membangun wisata tersebut di bentuk terlebih dahulu peraturan desa sebagaimana amanah undang-undang desa. Jika tidak demikian, maka penjaminan kepastian hukum terhadap pemasukan APBDES dalam pengelolaan wisata mangrove tidak akan pernah terwujud sehingga menimbulkan spekulasi yang negative di waktu yang akan datang. Oleh karenanya, UU Desa tentang Tata Kelola Wisata Mangrove Desa Kebundadap Timur harus dibentuk sebagai wujud kepastian hukum.

Kata Kunci: Urgensi Peraturan Desa, Otonomi Desa, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

A village is a legal community unit with territorial boundaries that has the authority to regulate and manage government affairs and local community interests based on community initiatives, original rights, and/or traditional rights that are recognized and respected in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Villages are granted autonomy in order to regulate and manage their own territories. Village legal products include village regulations, village head regulations, and joint village head regulations. In practice, village administrations often fail to make optimal use of village autonomy, resulting in many villages being unable to formulate their own village legal products due to a lack of guidance and coordination from the regional government, represented by the DPMD office. Therefore, this study was conducted to describe the urgency of village regulations in providing legal certainty for APBDES Revenue in Mangrove Tourism Management in Kebundadap Timur Village, Saronggi District, Sumenep Regency.

The method used in this study is a legal-empirical research method, which involves conducting field observations, interviews, and analysis in accordance with statutory provisions. The approach used in this study is field observation or an empirical sociological approach, which involves observing what happens in the field and the application of regulations in practice within the community.

The results of this study show that the village government, as the leader of the village with village autonomy rights, does not maximize its use. This is evidenced by the fact that Kebundadap Timur Village, which has tourism potential by developing mangrove tourism, does not have village regulations governing mangrove tourism management that includes revenue for the village budget (APBDES). The village government should have established village regulations in accordance with the village law before developing the tourism project. Otherwise, legal certainty regarding APBDES revenue from mangrove tourism management will never be realized, leading to negative speculation in the future. Therefore, the Village Law on Mangrove Tourism Management in Kebundadap Timur Village must be established to provide legal certainty.

Keywords: *Urgency of Village Regulations, Village Autonomy, Legal Certainty.*